SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Renbinwas) Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 62);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelengagaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintan yang bertugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, kebijakan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah.
10. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja yang bersangkutan.
14. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta metode kerja.
15. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disebut PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler.
16. Pemeriksaan Khusus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi, dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data, dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat, dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti.

18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
19. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai undang-undang, yang bertujuan mendanai otonomi daerah.
20. Dana Alokasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
22. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
25. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
26. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan dtetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
    a. menjadi pedoman tahunan dalam penyusunan rencana pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menajadi sasaran penyusunan PKTP.
    b. sinergitas pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
    c. menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efisien dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. mendukung keberhasilan pencapaian Program Strategis Nasional di Daerah; dan
    e. meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pengelolaan pengawasan berbasis risiko.

BAB II
KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Kebijakan pembinaan dan Pengawasan adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat melakukan Pengawasan terhadap:
    a. peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Daerah;
    b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Tanah Laut;
    c. percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada Pemerintahan Daerah dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya; dan
    d. pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan investigasi dengan tujuan tertentu.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Tujuan Pemeriksaan PKPT adalah:
a. mengetahui sejauh mana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengetahui sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengetahui sejauh mana realisasi penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengetahui sejauh mana pengelolaan barang Daerah, apakah sudah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
e. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
f. mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
g. mengetahui dan menilai pendayagunaan sumber daya manusia serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. mengetahui sejauh mana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

i. mengetahui dan menilai sejauh mana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penangan orang asing pada Pemerintah Daerah.

BAB IV
ASPEK PENGAWASAN

Pasal 5

Pengawasan PKPT meliputi:

a. penataan organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. kebijakan pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah);
c. kebijakan kedudukan keuangan ketua/wakil ketua dan Anggota DPRD;
d. pengelola Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, dan Dana Bagi Hasil;
e. hak dan kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah;
f. realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah;
g. tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
h. tindak lanjut daru Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
i. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
j. pengelolaan sumber daya manusia; dan
k. kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umun dan perlindungan masyarakat.

BAB V
RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 6

(1) Aspek manajemen yang menjadi ruang lingkup Pemeriksaan adalah memperbaiki meningkatkan mutu penanganannya pelaksanaan tugas pokok, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana, dan pelayanan publik.
(2) Aspek yang menjadi perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;
    b. aspek pengelolaan keuangan;
    c. aspek pengelolaan sumber daya manusia; dan
    d. aspek pengelolaan barang Daerah.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

(1) Prinsip pemeriksaan operasional mencakup:
   a. ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
   b. konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada;
   c. konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan; dan
   d. konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan.

(2) Sasaran Pemeriksaan adalah:
   a. penataan SKPD meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan dan latihan dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   b. pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan, pelaksanaan, perubahan, pertanggung jawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   c. realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten meliputi bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dari penerimaan sumber daya alam, pembagian daerah dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
   d. pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi, dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, asas manfaat pengadaan barang/jasa, dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan;
   e. penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitas kerja sama Daerah dan penyelesaian perselisihan Daerah, pemberian fasilitas penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   f. pengelolaan sumber daya manusia, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi

Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pegawai PPPK, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pengawai dan persyaratan kepangkatan, Pendidikan, dan latihan dalam pengangkatan jabatan struktural;

g. perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah;
h. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Program kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
i. penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VII
OBJEK PENGAWASAN

Pasal 8

Objek Pengawasan meliputi:
a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. dinas;
d. badan;
e. kantor kecamatan;
f. kelurahan;
g. desa;
h. sekolah; dan
i. badan layanan umum daerah.

BAB VIII
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 9

(1) Personil PKPT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
(2) Terhadap Personil PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dana penunjang.
(3) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dana yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah ahun anggaran 2026.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 10

Laporan PKPT terdiri dari:
a. pokok-pokok hasil pemeriksaan;
b. laporan hasil reviu dalam bentuk bab dan surat; dan
c. LHP dalam bentuk bab dan surat.

BAB X
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

(1) Tindak lanjut LHP adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek Pemeriksaan.
(2) Tindak lanjut hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh objek Pemeriksaan yang bersangkutan.
(3) Pemantauan tindak lanjut LHP wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.
(4) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemerikasaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XI
KOORDINASI PEMERIKSAAN

Pasal 12

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, inspektur jenderal kementerian dalam negeri, Inspektorat Provinsi atau lembaga pengawas fungsional lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, PKPT dan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI TANAH LAUT,

ttd.

H RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

ISMAIL FAHMI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

AFIRIAL, SH, MH
NIP 19[illegible]0203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 7 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2026

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 2026

No	Jenis Pengawasan	Tema Pengawasan	Nama Obrik	Jenis Kegiatan	Ruang Lingkup	Susunan Tim		HP	Rencana Mulai Pemeriksaan	Rencana Penyelesaian Laporan	Tanggal Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	19
1	Reviu DAU Kesehatan Tahap III (2025)	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2026	1 1 1 1 1 5	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	3	Januari minggu ke-1	Januari minggu ke-2	2 s.d 6 Januari 2026
2	Penyusunan PPBR	Assurance	Seluruh SKPD Program Strategis Pemda	Pengawasan Lainnya	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	5	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 2	2 s.d 8 Januari 2026
3	Reviu DAU	Assurance	Dinas Pendidikan	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	3	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 1	2 s.d 6 Januari 2026
4	Penyusunan PPBR	Assurance	Seluruh SKPD Program Strategis Pemda	Pengawasan Lainnya	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	5	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 2	2 s.d 8 Januari 2026
5	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Sumber Jaya	ATT	APBDes TA. 2021 dan 2022	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	20	Januari Minggu ke-1	Januari Minggu ke-4	2 s.d 30 Januari 2026
6	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa di Kecamatan Pelaihari	Monitoring	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	Januari minggu ke-2	Januari minggu ke-4	7 s.d 15 Januari 2026
7	Reviu DAU	Assurance	Kelurahan	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	3	Januari Minggu ke 2	Januari Minggu ke 2	7 s.d 9 Januari 2026
8	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Batu Ampar	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	15	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 4	2 s.d 23 Januari 2026
9	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa Wilayah Kec. Jorong	Pemantauan	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	11	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 4	9 s.d 26 Januari 2026
10	Evaluasi RB TW IV 2025	Assurance	PEMDA	Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT		Januari Minggu ke 2	Januari Minggu ke 3	9 s.d 15 Januari 2026
11	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Bati-Bati (14 desa)	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	15	Januari Minggu ke 2	Februari Minggu ke 1	9 s.d 30 Januari 2026
12	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa di Kecamatan Panyipatan	Monitoring	2025	1 1 1 1 1 5	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	Januari minggu ke-3	Februari minggu ke-1	22 Jan s.d 4 Februari 2026
13	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Bumi Makmur	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	10	Januari Minggu ke 5	Februari Minggu ke 1	26 Januari s.d 6 Februari 2026
14	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa Wilayah Kec. Kurau	Pemantauan	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	11	Januari Minggu ke 4	Februari Minggu ke 2	27 Januari s.d 10 Februari 2026
15	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Tambang Ulang (9 desa)	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	10	Februari Minggu ke 1	Februari Minggu ke 2	1 s.d 13 februari 2026
16	Reviu Lapkin	Assurance	SKPD Wilayah Irban I	Reviu	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	14	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-3	2 s.d 23 Februari 2026
17	Evaluasi RR Startegis dan Operasional	Assurance	BAPPERIDA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	5	April Minggu ke I	April Minggu ke 2	
18	Reviu ASB Fisik dan Non Fisik	Assurance		Reviu	2026	1 1 1 1 1 15	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Februari Minggu ke 1	Februari Minggu ke 2	2 s.d 13 Februari 2026
19	Reviu LKJIP	Assurance	Pemda	Reviu	TA.2025	1 1 1 1 1 20	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	14	Februari Minggu ke-1	Februari Minggu ke-3	2 s.d 20 Februari 2026
20	Reviu LPPD	Assurance	Pemkab TALA	Reviu	2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	5	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-2	5 s.d 20 Februari 2026
21	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Pelaihari	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1	PJ WPJ KOR Dalnis	6	Januari Minggu ke 1	Januari Minggu ke 1	9 s.d 18 Februari 2026

						1 7	KT AT				
22	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	1	Februari Minggu ke-2	Februari Minggu ke-2	10 Februari 2026
23	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa Wilayah Kec. Bajuin	Pemantauan	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Februari Minggu ke 2	Februari Minggu ke 4	11 s.d 25 Februari 2026
24	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Seluruh Desa di Kecamatan Kintap	Monitoring	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	Februari minggu ke-1	Februari minggu ke-4	12 s.d 27 Februari 2026
25	Pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa Wilayah Kecamatan Takisung (12 desa)	Monitoring dan Evaluasi	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	13	Februari Minggu ke 3	Maret Minggu ke 2	12 s.d 27 februari 2026
26	Reviu LKPD	Assurance	Pemerintah Kab. Tanah Laut	Reviu	2025	1 1 1 1 1 15	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Februari Minggu ke 3	Maret Minggu ke 3	19 Februari s.d 17 Maret 2026
27	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Tindak Lanjut SPI 2025 TW.1	2025	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Februari Minggu ke-3	Februari Minggu ke-4	23 s.d 27 Februari 2026
28	Validasi jawaban pada APIK P3DN	Pengawasan lainnya	SKPD	Pengawasan Lainnya	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-2	02 s/d 13 Maret 2026
29	Reviu HPS Proyek Strategis	Assurance	SKPD Wil. Irban I	Reviu	2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	5	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-2	2 s.d 6 Maret 2026
30	Pengawasan Lainnya	Assurance	15 SKPD ZI	Pendampingan ZI	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	Maret Minggu ke-1	Maret Minggu ke-2	2 s.d 13 Maret 2026
31	Audit Kinerja	Assurance	SKPD Wil. Irban I	Audit Kinerja	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	15	Maret minggu ke-1	Maret minggu ke-4	2 s.d 27 Maret 2026
32	Reviu SHS	Assurance		Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	15	Maret Minggu ke 1	Maret Minggu ke 2	2 s.d 6 Maret 2026
33	Probity Audit Tahap Pelaksanaan	Assurance	SKPD Wil. Irban I	ATT	2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR KT Anggota Tim	10 Bulan	Maret	Desember	9 Mar s.d 15 Des2026
34	Evaluasi RV ex-ante 2026	Assurance	PEMDA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT		Maret Minggu ke 2	Maret Minggu ke 3	9 s.d 17 Maret 2026
35	Evaluasi ZI	Assurance	15 SKPD ZI	Evaluasi ZI	2025	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	13	Maret Minggu ke-3	April Minggu ke-1	16 Maret s.d 2 April 2026
36	Reviu HPS	Assurance	DPUPRP	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	3	Maret Minggu ke 4	Maret Minggu ke 4	25 s.d 27 Maret 2026
37	Reviu HPS Proyek Strategis		SKPD dengan proyek strategis	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Februari Minggu ke 4	Februari Minggu ke 4	25 s.d 31 Maret 2026
38	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Batu Ampar	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	10	Maret Minggu ke 5	April Minggu ke 4	30 Maret s.d 27 April 2026
39	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Bati-Bati	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	10	Maret Minggu ke 5	April Minggu ke 3	30 Maret s.d 13 April 2026
40	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		1 Desa di Wilayah Kecamatan Jorong (1)	Audit	2025	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	10	Maret Minggu ke 3	April Minggu ke 2	1 s.d 15 April 2026
41	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Kecamatan Pelaihari	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	April Minggu ke 1	April Minggu ke 3	1 s.d 15 April 2026
42	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Puskesmas Pelaihari	ATT	BOK TA.2023 dan 2024	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	15	April Minggu ke-1	April Minggu ke-3	2 s.d 24 April 2026
43	Evaluasi RB On-going TW I 2026	Assurance	PEMDA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT		April Minggu ke 2	April Minggu ke 3	06 s.d 10 April 2026
						1 1	PJ WPJ				

44	Pemantauan P3DN	Pemantauan	SKPD	Pemantauan	2026	1 1 1 7	KOR PT KT AT	8	April minggu ke-2	April minggu ke-3	07 s/d 16 Juli 2026
45	REVIU HPS	Assurance	SKPD	Reviu	2027	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	9	April Minggu ke 3	April Minggu ke 3	13-17 april 2026
46	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	1	April Minggu ke-2	April Minggu ke-2	14 April 2026
47	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Kecamatan Panyipatan	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	10	April Minggu ke-2	April Minggu ke-4	16 s.d 29 April 2026
48	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW 1		SKPD Wilayah Irban 4	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	April Minggu ke 2	April Minggu ke 3	16 s.d 20 April 2026
49	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW 1	Assurance	Seluruh SKPD di Wilayah Irban I	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 5	PJ WPJ KOR PT KT Anggota Tim	3	April minggu ke-3	April minggu ke-3	16 s.d 20 April 2026
50	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW 1	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	9	April Minggu ke 4	April Minggu ke 5	20 s. d 27 april 2026
51	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Desa di Wilayah Kecamatan Jorong (2)	Audit Ketaatan	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	April Minggu ke 3	Mei Minggu ke 1	21 April s.d 5 Mei 2026
52	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW 1	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	April Minggu ke 4	April Minggu ke 5	23 s.d 27 April 2026
53	Pengawasan Lainnya	Assurance	Desa Swarangan	Telaahan Awal	APBDes 2023 dan 2024	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ/ PT KOR PT KT AT	9	April Minggu ke-4	Mei Minggu ke-2	27 April s.d 8 Mei 2026
54	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Batu Ampar	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	April Minggu ke 5	Mei Minggu ke 2	28 April s.d 13 Mei 2026
55	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Bati-Bati	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	April Minggu ke 5	Mei Minggu ke 2	29 April s.d 13 Mei 2026
56	Pendampingan SPIP	Assurance	Seluruh SKPD	Pengawasan Lainnya	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT		Mei Minggu ke 1	Mei Minggu ke 4	4 s.d 29 Mei 2026
57	Probity Audit	Assurance		ATT	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	April Minggu ke 3	Desember Minggu ke 4	4 Mei s.d 31 Desember 2026
58	Probity Audit	Assurance	DPUPRP	ATT	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT		Mei Minggu ke 1	Desember Minggu ke 4	4 Mei s.d 31 Desember 2026
59	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT AT	1	Mei Minggu ke-2	Mei Minggu ke-2	12 Mei 2026
60	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Swarangan	Audit Investigasi	APBDes 2023 dan 2024	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ/ PT KOR PT KT AT	56	Mei Minggu ke-2	Juli Minggu ke-4	16 Mei s.d 31 Juli 2026
61	Reviu RKPD 2027	Assurance	Seluruh SKPD Pemkab TALA	Reviu	2027	1 5 1 1 1 50	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Mei minggu ke-3	Mei minggu ke-4	18 s.d 22 Mei 2026
62	Evaluasi AKIP	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2025	1 5 1 1 1 50	PJ WPJ KOR PT KT AT	14	Mei minggu ke-4	Juni minggu ke-1	25 Mei s.d 19 Juni 2026
63	PK SPIP	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT		Juni Minggu ke 1	Juni Minggu ke 5	2 s.d 30 Juni 2026
64	REVIU KUA 2027	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2027	1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	15	Juni Minggu ke 1 dan 2	Juni Minggu ke 3	2 s.d 12 Juni 2026
65	Reviu Rancangan Akhir RENJA 2027	Assurance	SKPD Wilayah Irban I	Reviu	2027	1 1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Juni Minggu ke-3	Juni Minggu ke-4	15 s.d 26 Juni 2026
66	Reviu Ranhir Renja TA. 2027	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Reviu	2027	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT	5	Juni Minggu ke 3	Juni Minggu ke 4	15.s.d 26 Juni 2026

						7	AT				
67	Reviu Ranhir Renja SKPD Tahun 2027		SKPD Wilayah Irban 4	Reviu	2027	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juni Minggu ke 3	Juni Minggu ke 4	15 Juni s.d 26 Juni 2026
68	Reviu Ranhir Renja TA. 2027	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Reviu	2027	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juni Minggu ke 3	Juni Minggu ke 4	15 s.d 26 Juni 2026
69	Audit TIK		Diskominfo	Audit Dengan Tujuan Tertentu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juni Minggu ke 3	Juni Minggu ke 4	17 s.d 30 Juni 2026
70	Reviu BMD	Reviu	BPKAD	Reviu	2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Juni Minggu ke-4	Juni Minggu ke-5	22 s.d 26 Juni 2026
71	EVALUASI SAKIP + PENDAMPINGAN	Assurance	Seluruh SKPD	Evaluasi	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	40	mei minggu 4	Juni Minggu ke 2	25.s.d 19 Juni 2026
72	Monitoring Pelaksanaan MBG	Assurance		Pemantauan	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juni Minggu ke 5	Juli Minggu ke 2	29 Juni s.d 10 Juli 2026
73	Reviu Pelayanan Publik	Assurance	1 SKPD Wilayah Irban 3	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juni Minggu ke 4	Juli Minggu ke 1	29 Juni s.d 10 Juli 2026
74	Evaluasi RB On-going TW II	Assurance	PEMDA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juni Minggu ke 5	Juli Minggu ke 2	29 Juni s.d 10 Juli 2026
75	Monitoring Pengelolaan Risiko Semester 1	Assurance	SKPD Wilayah Irban I	Monitoring	2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli minggu 1	Juli minggu 2	1 s.d 3 Juli 2026
76	Reviu DAK Fisik Tahap I		DPUPRP	Reviu	2026	1 1 1 1 1 3	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Juli Minggu ke 1	Juli Minggu ke 1	1 s.d 7 Juli 2026
77	Pemantauan RTP RR Semester I		SKPD Wilayah Irban 4	Pemantauan	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli Minggu ke 1	Juli Minggu ke 2	3 s.d 7 Juli 2026
78	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa .... Di Kecamatan Pelaihari	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juli minggu 2	Juli minggu 3	6 s.d 17 Juli 2026
79	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Tindak Lanjut SPI 2025 TW.2	TW.2 2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Juli Minggu ke-1	Juli Minggu ke-2	6 s.d 10 Juli 2026
80	Reviu P3DN	Reviu	SKPD	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juli minggu ke-2	Juli minggu ke-3	06 s/d 17 Juli 2026
81	Monitoring Pengadaan Lahan Sekolah Rakyat	Assurance		Pemantauan	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juli Minggu ke 1	Juli Minggu ke 1	6 s.d 14 Juli 2026
82	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW II		SKPD Wilayah Irban 4	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli Minggu ke 3	Juli Minggu ke 3	8 s.d 10 Juli 2026
83	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 1	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli Minggu ke 4	Juli Minggu ke 4	13 s.d 15 Juli 2026
84	Reviu	Assurance	Pemda	Reviu RKPD Perubahan	RKPD Perubahhan	1 1 1 1 1 35	PJ WPJ/ PT KOR PT KT AT	5	Juli Minggu ke-2	Juli Minggu ke-2	13 s.d 17 Juli 2026
85	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Tambang Ulang	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR Dalnis KT AT	9	Juli Minggu ke 3	Juli Minggu ke 4	13 s.d 24 Juli 2026
86	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT AT	1	Juli Minggu ke-2	Juli Minggu ke-2	14 Juli 2026
87	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa ..... Kecamatan Panyipatan	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juli minggu 4	Juli minggu 5	20 s.d 31 Juli 2026
88	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Bumi Makmur	Audit	2025	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Juli Minggu ke 4	Juli Minggu ke 5	20 s.d 31 Juli 2026
						1 1	PJ WPJ				

89	Audit Kinerja SKPD		SKPD sesuai hasil PPBR	Audit	2026	1 1 1 7	KOR PT KT AT	25	Juli Minggu ke 3	Agustus Minggu ke 4	20 Juli s.d 24 Agustus 2026
90	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli Minggu ke 4	Juli Minggu ke 5	24 s.d 28 Juli 2026
91	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Evaluasi	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juli Minggu ke 5	Juli Minggu ke 5	27 s.d 29 Juli 2026
92	Pemantauan RTP RR Semester II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Juli Minggu ke 5	Juli Minggu ke 5	27 s.d 29 Juli 2026
93	Pemantauan RTP RR Semester I	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	3	Juli Minggu ke 5	Juli Minggu ke 5	29 s.d 31 Juli 2026
94	Reviu	Assurance	Pemda	Reviu KUA PPAS Perubahan 2026	KUA PPAS Perubahan	1 1 1 1 1 35	PJ WPJ/ PT KOR PT KT AT	5	Agustus Minggu ke-1	Agustus Minggu ke-2	3 s.d 8 Agustus 2026
95	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Martadah Baru	ATT		1 1 1 1 1 6	PJ WPJ/ PT KOR PT KT AT	19	Agsutus Minggu ke-1	Agustus Minggu ke-4	3 s.d 31 Agustus 2026
96	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa ..... Kecamatan Kintap	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 1 6	PJ WPJ KOR PT KT AT	10	Agustus minggu ke-1	Agustus minggu ke-2	6 s.d 20 Agustus 2026
97	Reviu RENJA Perubahan 2026	Assurance	SKPD Wilayah Irban I	Reviu	2026	1 1 1 1 1	PJ WPJ KOR PT KT	5	Agustus Minggu ke-2	Agustus Minggu ke-2	10 s.d 14 Agustus 2026
98	Reviu Ranhir Renja Perubahan TA. 2026	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	5	Agustus Minggu ke 2	Agustus Minggu ke 2	10 s.d 14 Agustus 2026
99	Reviu Perubahan Renja SKPD 2026		SKPD Wilayah Irban 4	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Agustus Minggu ke 2	Agustus Minggu ke 3	10 s.d 14 Agustus 2026
100	Reviu Ranhir Renja Perubahan TA. 2026	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Reviu	2026	1 1 1 1 1 7	PJ WPJ KOR PT KT AT	9	Agustus Minggu ke 2	Agustus Minggu ke 2	10 s.d 14 agustus 2026
101	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026			1	Agustus Minggu ke2	Agustus Minggu ke-2	11 Agustus 2026
102	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Tambang Ulang	Audit	2025	1 1 1 7	WPJ Dalnis KT AT	9	Agustus Minggu ke 2	Agustus Minggu ke 5	14 s.d 31 Agustus 2026
103	Reviu RKA-P 2026	Assurance	Seluruh SKPD Pemkab TALA	Reviu	2026	5 1 1 50	WPJ PT KT Anggota Tim	5	Agustus minggu ke-3	Agustus minggu ke-4	18 s.d 24 Agustus 2026
104	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Bumi Makmur	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	Agustus Minggu ke 4	September Minggu ke 2	24 Agustus s.d 7 September 2026
105	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Wilayah Kecamatan Kurau (1)	Audit Ketaatan	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	Agustus Minggu ke 4	September Minggu ke 1	26 Agustus s.d 8 September2026
106	Audit Perjalanan Dinas XXX	Assurance	XXX	Audit Tujuan Tertentu	2025	1 1 1 1 1	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	3	September Minggu ke-1	September Minggu ke-3	1 s.d 14 September 2026
107	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Kuringkit	PKKN	APBDes 2024	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	9	September Minggu ke-1	September Minggu ke-2	1 s.d 11 September 2026
108	Reviu RKA TA. 2027	Assurance	Seluruh SKPD	Reviu	2027	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	September Minggu ke 2	September Minggu ke 3	7 s.d 18 September 2026
109	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Sosialisasi Antikorupsi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	1	September Minggu ke-2	September Minggu ke-2	8 September 2026
110	Pengawasan Lainnya	Assurance	Desa Ranggang Dalam	Telaahan Awal	APBDes 2024	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	13	September Minggu ke-1	September Minggu ke-2	14 s.d 30 September 2026
111	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Takisung	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	September Minggu ke 3	September Minggu ke 4	14 s.d 25 Sept 2026
112	Reviu DAU Kesehatan Tahap II	Assurance	Dinas Kesehatan	Reviu	2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	3	September minggu ke-4	September minggu ke-4	21 s.d 23 September 2026
113	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Pelaihari	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	September Minggu ke 4	Oktober Minggu ke 1	21 September s.d 2 Oktober 2026
114	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Wilayah Kecamatan Kurau (2)	Audit Ketaatan	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	September Minggu ke 4	Oktober Minggu ke 1	21 September s.d 2 Oktober 2026
						1	PJ				

115	Pemantauan RTP RR Semester III	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Pemantauan	2026	1 1 1 7	WPJ Dalnis KT AT	9	September Minggu ke 5	September Minggu ke 5	28 s.d 30 Sept 2026
116	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW III	Assurance	SKPD Wilayah Irban 1	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	3	Oktober Minggu ke 1	Oktober Minggu ke 1	1 s.d 5 Oktober 2026
117	Reviu DAK Fisik Tahap II	Assurance	DPUPRP	Reviu	2026	1 1 1 1 3	PJ WPJ PT KT AT	5	Oktober Minggu ke 1	Oktober Minggu ke 1	1 s.d 7 Oktober 2026
118	Audit Desa Keenam	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Takisung	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	Oktober Minggu ke 1	Oktober Minggu ke 3	1 s.d 14 okt 2026
119	Pengawasan Lainnya	Consulting	Pemda	Tindak Lanjut SPI 2025 TW.3	TW.3 2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	5	Oktober Minggu ke-1	Oktober Minggu ke-2	1 s.d 9 Oktober 2026
120	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Ranggang Dalam	Audit Investigasi	APBDes 2024	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	22	September Minggu ke-3	September Minggu ke-4	1 s.d 31 Oktober 2026
121	Audit Desa Keenam	Assurance	1 Desa Wilayah Kecamatan Pelaihari	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	Oktober Minggu ke 2	Oktober Minggu ke 3	5 s.d 16 Oktober 2026
122	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW III	Assurance	SKPD Wilayah Irban 4	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	3	Oktober Minggu ke 1	Oktober Minggu ke 1	5 s.d 7 Oktober 2026
123	Reviu Pelayanan Publik	Reviu	RSUD	Reviu	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	Oktober minggu ke-2	Oktober minggu ke-3	6 s.d 19 Oktober 2026
124	Pemantauan SKPD	Assurance	SKPD Wilayah Irban 4	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	13	Oktober Minggu ke 1	Oktober Minggu ke 3	8 s.d 23 Oktober 2026
125	Evaluasi RB On-going TW III 2026	Assurance	PEMDA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	Oktober Minggu ke 3	Oktober Minggu ke 3	15 s.d 28 Oktober 2026
126	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Kecamatan Pelaihari	Audit Kinerja	2025 dan 2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	10	Oktober minggu ke-4	Oktober minggu ke-5	19 s.d 30 Oktober 2026
127	Monev SKPD	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Monitoring dan Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	Oktober Minggu ke 4	Oktober Minggu ke 5	19 s.d 30 Oktober 2026
128	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Wilayah Kecamatan Bajuin (1)	Audit Ketaatan	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	Oktober Minggu ke 4	November Minggu ke 1	26 Oktober s.d 6 November 2026
129	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW III	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	3	Oktober Minggu ke 5	Oktober Minggu ke 5	28 s.d 30 Oktober 2026
130	Monev SKPD	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Monitoring dan Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	Oktober Minggu ke 5	November Minggu ke 2	28 Okt s.d 10 Nov 2026
131	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW III	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	3	Oktober Minggu ke 5	Oktober Minggu ke 5	28 s.d 30 Oktober 2026
132	Evaluasi Gender	Assurance	Seluruh SKPD Pemkab TALA	Evaluasi	2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	10	November minggu ke- 1	November minggu ke 3	2 s.d 13 November 2026
133	Audit Kinerja	Assurance	1 SKPD Wilayah Irban 2	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	November Minggu ke 1	November Minggu ke 2	2 s.d 13 November 2026
134	Pengawasan Lainnya	Assurance	Desa Batakan	Telaahan Awal	APBDes TA. 2022 dan 2023	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	10	November Minggu ke-1	November Minggu ke-2	2 s.d 13 November 2026
135	Reviu Manajemen ASN	Asaurance	BKPSDM	Reviu	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	November Minggu ke 2	November Minggu ke 3	9 s.d 20 November 2026
136	Monitoring Pengadaan Lahan Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan	Assurance	Seluruh Desa dan Kelurahan Wilayah Irban 2	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	20	November Minggu ke 3	Desember Minggu ke 2	16 Nov s.d 11 Desember 2026
137	Monitoring Pengadaan Lahan Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan	Assurance	SKPD Wilayah Irban 1	Monitoring	2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	20	November minggu ke- 3	Desember minggu ke 3	16 Nov s.d 11 Desember 2026
138	Audit Kinerja	Assurance	1 SKPD Wilayah Irban 3	Audit	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	November Minggu ke 2	November Minggu ke 3	16 s.d 30 November 2026
139	Pemantauan Pengadaan Lahan Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan	Assurance	Desa dan Kelurahan di Wilayah Irban 4	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	20	November Minggu ke 3	Desember Minggu ke 2	16 Nov s.d 11 Desember 2026
140	Reviu DAK Fisik Tahap III	Assurance	DPUPRP	Reviu	2026	1 1 1 1 3	PJ WPJ PT KT AT	5	November Minggu ke 4	November Minggu ke 4	24 s.d 30 November 2026
141	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW IV	Assurance	SKPD Wilayah Irban 1	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	3	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 3	1 s.d 3 Desember 2026
	Monitoring Pengadaan Lahan		Seluruh Desa dan Kelurahan Wilayah Irban 3			1 1	PJ WPJ				

142	Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan	Assurance		Pemantauan	2026	1 1 7	Dalnis KT AT	9	Desember minggu 1	Desember minggu 1	1 s.d 7 Desember 2026
143	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW IV	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	Desember Minggu ke 2	Desember Minggu ke 3	7 s.d 18 Desember 2026
144	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Assurance	Desa di Wilayah Kecamatan Bajuin (2)	Audit Ketaatan	2025	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	10	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 4	10 s.d 23 Desember 2026
145	Monev SKPD	Assurance	Seluruh SKPD di Wilayah Irban I	Monitoring	2025	1 1 1 1 5	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	12	Desember Minggu ke 2	Desember Minggu ke 3	14 s.d 31 Desember 2026
146	Reviu Pelayanan Publik	Assurance	1 SKPD Wilayah Irban 2	Reviu	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	10	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 5	14 s.d 29 Desember 2026
147	Monitoring Pengelolaan Risiko Semester 2	Assurance	SKPD Wilayah Irban I	Monitoring	2026	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	3	Desember minggu ke-3	Desember minggu ke - 4	14 s.d 19 Desember 2026
148	Penyusunan PKPT TA. 2027	Assurance	Inspektorat	Pengawasan Lainnya	2027	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	5	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 3	14 s.d 18 Desember 2026
149	Audit Tujuan Tertentu	Assurance	Desa Batakan	Audit Investigasi	APBDes TA. 2022 dan 2023	1 1 1 1 6	PJ WPJ PT KT Anggota Tim	33	November Minggu ke-3	Desember Minggu ke-4	16 s.d 31 Desember 2026
150	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW IV	Assurance	SKPD Wilayah Irban 4	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	13	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 4	18 s.d 22 Desember 2026
151	Pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi Tindak lanjut AKIP TW IV	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Evaluasi	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	3	Desember Minggu ke 4	Desember Minggu ke 4	21 s.d 23 Desember 2026
152	Pemantauan RTP RR Semester II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	Desember Minggu ke 4	Desember Minggu ke 4	21 s.d 23 Desember 2026
153	Pemantauan RTP RR Semester II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 4	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	3	Desember Minggu ke 3	Desember Minggu ke 4	23 s.d 29 Desember 2026
154	Pemantauan RTP RR Semester II	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	2	Desember Minggu ke 5	Desember Minggu ke 5	28 s.d 29 Desember 2026
155	Pemantauan Penutupan Kas	Assurance	SKPD Wilayah Irban 1	Monitoring	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	2	Desember Minggu ke 4	Desember Minggu ke 4	30 s.d 31 Desember 2026
156	Pemantauan Penutupan Kas	Assurance	SKPD Wilayah Irban 2	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	2	Desember Minggu ke 5	Desember Minggu ke 5	30 s.d 31 Desember 2026
157	Pemantauan Penutupan Kas	Assurance	SKPD Wilayah Irban 3	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ Dalnis KT AT	9	Desember Minggu ke 5	Desember Minggu ke 5	30 s.d 31 Desember 2026
158	Pemantauan Penutupan Kas	Assurance	SKPD Wilayah Irban 4	Pemantauan	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	2	Desember Minggu ke 4	Desember Minggu ke 4	30 s.d 31 Desember 2026
159	Probity audit Tahap Pelaksanaan	Assurance	SKPD dengan proyek strategis	Audit Dengan Tujuan Tertentu	2026	1 1 1 1 7	PJ WPJ PT KT AT	sesuai waktu	sesuai waktu kontrak	sesuai waktu kontrak	sesuai waktu kontrak

BUPATI TANAH LAUT

ttd.

H. RAHMAT TRIANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

FIRIAL, SH, MH
NIP. 19730203 199903 2 008